SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SEMANDANG KIRI KABUPATEN KETAPANG

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Abdel Yulio Yusno
NIM. E1012191002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SEMANDANG KIRI KABUPATEN KETAPANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Kebijakan Publik

Oleh:

Abdel Yulio Yusno
NIM. E1012191002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA SEMANDANG KIRI KABUPATEN KETAPANG

Oleh :
Abdel Yulio Yusno
E1012191002

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Yulius Yohanes, M.Si.

NIP. 1972052006041001

Tanggal: 2 Juni 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Hairil Anwar, S.E.M.Si

NIP. 196905142007011004

Tanggal: 2 Juni 2025

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SEMANDANG KIRI KABUPATEN KETAPANG

Oleh:
Abdel Yulio Yusno
NIM. E1012191002

Dipertahankan di :
Pada Hari/Tanggal/ : Jum'at / 30 Januari 2026
Waktu : 08:30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UNTAN

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Yulius Yohanes, M.Si.	Hairil Anwar, S.E., M.Si.
NIP. 1972052006041001	NIP. 196905142007011004
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Zulkarnaen, M.Si.	Martinus, S.Sos., M.Si.
NIP. 196402081988101001	NIP.197212272006041002

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si.
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

ABDEL YULIO YUSNO (E1012191002) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang Skripsi. **Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura 2026**

Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaruh implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Permasalahan mengenai implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) ini cukup menarik untuk diteliti mengingat ketikapelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat desa masih belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan adanya kendala dalam komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, sikap pelaksana yang belum maksimal, serta struktur birokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya upayaperbaikan dan peningkatan dalam setiap aspek implementasi kebijakan, baik melalui peningkatan kualitas komunikasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan komitmen pelaksana, maupun perbaikan sistem koordinasi dan struktur birokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri secara umum telah berjalan dengan baik. Aspek komunikasi terlaksana secara terbuka dan konsisten melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Sumber daya dinilai cukup mendukung, baik dari segi kemampuan aparatur desa maupun ketersediaan sarana prasarana, meskipun masih terdapat kendala teknis. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan kebijakan sesuai peraturan.

Kata Kunci: Implementasi, KebijakanPublik, dan Alokasi Dana Desa.

ABSTRACT

ABDEL YULIO YUSNO (E1012191002) Implementation of the Village Fund Allocation (ADD) Policy in Semandang Kiri Village, Ketapang Regency. Undergraduate Thesis. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, 2026.

The aim of this undergraduate thesis is to provide an overview of the influence of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) policy. The issues surrounding the implementation of the ADD policy are quite interesting to study, given that the execution of this policy at the village level has not yet run optimally. It is indicated by obstacles in communication, limited human resources, suboptimal attitudes of implementers, and bureaucratic structure. Therefore, efforts are needed to improve and enhance every aspect of policy implementation, both through improving communication quality, strengthening human resource capacity, increasing implementer commitment, and improving coordination systems and bureaucratic structures. The purpose of this research is to identify the factors that influence the implementation of the ADD policy. The method used in this research was qualitative. Data were collected through interviews. The results show that the implementation of the ADD policy in Semandang Kiri Village has generally proceeded well. The communication aspect is carried out openly and consistently through the dissemination of information to the community. Resources are considered quite supportive, both in terms of the capacity of village officials and the availability of infrastructure despite technical obstacles. The disposition or attitude of implementers shows high commitment and responsibility in carrying out the policy in accordance with the regulations.

Keywords*: Implementation, Public Policy, and Village Fund Allocation*

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana DESA (ADD) di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang”. Penulis memilih judul ini dikarenakan ketika pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di tingkat desa masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan serta pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rumasan masalah pada penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan. Alasan penulis menggunakanTeori Implementasi Kebijakan mengacu pada sejauh mana kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat desa, khususnya dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari teori ini, penulis mampu untuk mengetahui implementasi kebijakan Alokasi Dana DESA (ADD) di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif guna mendeskripsikan suatu obyek yang akan diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa aspek yang menjadi indikator dalam penelitian. Dari aspek komunikasi, pelaksanaan kebijakan telah dilakukan secara terbuka dan

konsisten melalui penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, baik melalui pertemuan langsung maupun media informasi lainnya.

Dari aspek sumber daya, secara umum dinilai cukup mendukung. Aparatur desa memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola dana desa, meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis yang perlu diperbaiki. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana juga cukup menunjang pelaksanaan kebijakan, meskipun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pada aspek disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Mereka berupaya untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan kebijakan telah didukung oleh sistem organisasi yang cukup baik. Pembagian tugas dan tanggung jawab antar perangkat desa telah berjalan dengan cukup jelas, sehingga memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri. Pertama, pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas

komunikasi dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka, jelas, dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah desa. perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi perangkat desa, anggota BPD, serta pihak terkait lainnya. Dengan meningkatnya kompetensi dan profesionalisme, diharapkan pengelolaan keuangan dan pembangunan desa dapat dilakukan secara lebih optimal. penting untuk mempertahankan dan meningkatkan sikap positif serta komitmen para pelaksana kebijakan melalui pembinaan dan evaluasi secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Abdel Yulio Yusno
N I M	:	E1012191002
Program Studi	:	Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 17 Maret 2026
Saya Membuat Pernyataan Ini



Abdel Yulio Yusno
NIM. E1012191002

MOTTO DAN PEMSEMBAHAN

Motto

"SAYA TIDAK TAHU APA YANG AKAN TERJADI, TETAPI SATU HAL YANG BISA SAYA LAKUKAN AKAN TERJADI".

(St. Maria Magdalena)

Persembahan

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan anugerah serta karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur dan rasa cinta, sehingga skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya yang tercinta Ayah Servasius Supriyadi Ibunda Rosiana Rikin, yang telah memberikan semangat, motivasi, dorongan, serta doa yang tiada hentinya mereka panjatkan dalam setiap langkah saya.
2. Untuk saudara saya yang tercinta abang Srilinus Lino yang selalu memberikan dorongan, semangat dan doa terbaik yang tiada henti kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang" ini dapat diselesaikan dengan baik tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari penulis Skripsi ini, karena hasil yang dicapai melalui Skripsi ini harus merupakan langkah awal dari suatu perjalanan panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelsaikan Skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, M.S.i., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Yulius Yohanes, M.Si., selaku pembimbing utama sekaligus selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulis penelitian Skripsi ini.
3. Hairil Anwar, S.E. M.Si., selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, motivasi dan bimbingan selama proses penulis penelitian Skripsi ini.
4. Dr. Zulkarnaen, M. Si., selaku penguji pertama yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
5. Martinus, S. Sos, M. Si., selaku penguji kedua yang telah memberikan berbagai saran dan masukan demi penyempurnaan skripsi ini.

6. Ira Patriani, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Drs. Abdul Rahim, M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa studi saya.
8. Wakil Dekan, Bapak/ Ibu Dosen, Staff Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
9. Kepala desa, staff dan tokoh masyarakat di Desa Semandang Kiri yang menjadi informan pada penelitian ini yang banyak meluangkan waktu untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
10. Seluruh mahasiswa FISIP Untan angkatan 2019 yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya Amin.

Pontianak, 17 Maret 2026

Peneliti

Abdel Yulio Yusno
NIM. E1012191002

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iv**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah Penelitian 9
1.3. Fokus Masalah 9
1.4. Rumusan Masalah 10
1.5. Tujuan Penelitian 10
1.6. Manfaat Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
2.1. Definisi Konsep 13
2.1.1. Teori Implementasi Kebijakan 13
2.1.2. Implementasi Kebijakan 15
2.1.3. Kebijakan Publik 18
2.1.4. Desa 20
2.1.5. Alokasi Dana Desa 22
2.2. Hasil Penelitian Yang Relevan 25
2.3. Kerangka Pikir Penelitian 27
2.4. Pertanyaan Penelitian 28
BAB III METODE PENELITIAN **30**
3.1. Jenis Penelitian 30
3.2. Langkah-Langkah Penelitian 30
3.2.1. Penelitian Keperpustakaan 30
3.2.2. Penelitian Lapangan 30
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 31
3.3.1. Lokasi Penelitian 31
3.3.2. Waktu Penelitian 31
3.4. Objek dan Subjek Penelitian 31
3.4.1. Objek Penelitian 31
3.4.2. Subjek Penelitian 32
3.5. Teknik Pengumpulan Data 33
3.6. Instrumen Penelitian atau Alat Pengumpulan Data 35
3.7. Teknik Analisis Data 36
3.8. Keabsahan Data 37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 40
4.1. Profil Desa Semandang Kiri..... 40
4.2. Keadaan Tanah dan Luas Penggunaan Lahan Desa Semandang Kiri 41
4.3. Kondisi Kependudukan Desa Semandang Kiri..... 41
4.4. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Desa Semandang Kiri 42
4.5. Iklim Wilayah Desa Semandang Kiri 43
4.6. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Semandang Kiri 43
4.7. Kepercanyaan Agama Desa Semandang Kiri 44
4.8. Etnis Desa Semandang Kiri 45
4.9. Mata Pencarian Pokok Desa Semandang Kiri 46
4.10. Adat Istiadat Desa Semandang Kiri..... 46
4.11. Prasarana Pendidikan Desa Semandang Kiri..... 47
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
5.1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Semandang Kiri 49
5.1.1. Komunikasi 49
5.1.2. Sumber Daya..... 59
5.1.3. Diposisi atau Sikap Pelaksana..... 73
5.1.4. Struktur Birokrasi..... 78
5.2. Pembahasan..... 79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 92
6.1. Kesimpulan 92
6.2. Saran..... 94
6.3. Keterbatasan Penelitian..... 95
DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel *halaman*

1.1. Penggunaan Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025 6
3.1. Jadwal Penelitian 31
4.1. Luas Penggunaan Lahan Desa Semandang Kiri 41
4.2. Jumlah Kependudukan Desa Semandang Kiri 42
4.3. Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin Desa Semandang Kiri 42
4.4. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Semandang Kiri 44
4.5. Kepercanyaan Agama Desa Semandang Kiri 45
4.6. Etnis Desa Semandang Kiri 45
4.7. Penduduk Mata Pencarian Pokok Desa Semandang Kiri 46
4.8. Adat Istiadat Desa Semandang Kiri 47
4.9. Prasarana Pendidikan Desa Semandang Kiri 48

DAFTAR GAMBAR

Gambar *halaman*

2.1. Kerangka Berfikir Penelitian 28
4.1. Peta Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu 40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran *halaman*

Pedoman Wawancara 100
Daftar Nama Subjek Penelitian/ Informan 103
Pedoman Observasi 104
Dokumentasi Penelitian 105
Daftar Riwayat Hidup 106
Surat Permohonan Data Wawancara Dan Surat Tugas 107
Peta Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang 109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan daerah dan desa berjalan dengan seimbang. Strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pemberian otonomi desa yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal agar dapat menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara (Ningsih, 2024:53).

Desa yang membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah desa dan menjadi harapan bagi kembalinya pengakuan akan eksistensi desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan yang otonom demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Putra, 2023:12).

Pemerintah Desa dapat meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pembangunan sesuai dengan sumber daya, dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan otonomi desa dapat memberikan dampak positif apabila Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan memunculkan identitas masyarakat lokal yang juga berpengaruh terhadap pelayanan masyarakat (Rahman, 2024:160). Selain berdampak positif, otonomi memiliki dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu menimbulkan kesempatan kepada pihak oknum di tingkat desa untuk melakukan pelanggaran yang berakibat mempengaruhi kegiatan pembangunan. Supaya tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan atas kewenangan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat oleh pemerintah (Ningsih, 2024:55).

Desa merupakan kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sandika, 2024:212).

Pembangunan merupakan salah satu hal yang penting yang menjadi permasalahan pokok di Indonesia, terutama pedesaan. Masyarakat desa khususnya bagian terpencil sangat minim akan pembangunan karena belum

adanya perhatian dari pemerintah. Berbicara tentang pembangunan desa, maka pasti tidak terlepas dengan adanya alokasi dana desa (Irmansyah, 2021:86). Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang tepat didalam sebuah desa dapat menambah keinginan masyarakat agar dapat lebih maju dan bisa bersaing dengan desa-desa lainnya agar bisa menjadi desa yang terbaik dimata negara. Dalam hal ini perlu adanya campur tangan pemerintah dan juga kepala desa yang cerdas dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap alokasi dana desa tersebut (Sandika, 2024:213).

Kebijakan kewenangan di tangan pemerintahan desa dan bergulirnya dana perimbangan melalui alokasi dana desa diharapkan dapat menjadikan desa sejahtera. Alokasi dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, semuanya itu dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa (Wuaten, 2024:157). Alokasi dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, setelah mendapat persetujuan bupati/walikota dengan memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Nasution, 2023:12).

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan

prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk alokasi dana desa (Ramandei, 2022:12).

Dalam alokasi dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan, dalam prosesnya masyarakat bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dengan adanya alokasi dana desa, maka pemerintah dituntut memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel (Pramudiana, 2019:40).

Dalam rangka mempercepat laju pembangunan desa karena negara dalam hal ini pemerintah akan memberikan dukungan dana dalam setiap tahunnya yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya, dan setiap perangkat desa akan medapat penghasilan tetap dengan pemberian pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang dimasukkan dalam regulasi berupa peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (Suhartono, 2019:131).

Kewenangan desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa sendiri berdasarkan pada dokumen perencanaan desa yang harus menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Hal ini merupakan wujud dari upaya pembangunan desa menggunakan dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun lalu merilis ada 110 kasus penyelewengan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sepanjang 2017 sampai dengan 15 September 2018. Dari 110 kasus itu, pelakunya rata-rata dilakukan oknum Kepala Desa (Ningsih, 2024:57).

Buktinya dari 139 pelaku, 107 diantaranya adalah Kepala Desa dan pelaku korupsi lainnya adalah 30 perangkat Desa dan istri Kepala Desa sebanyak 2 orang. Rata-rata korupsi yang dilakukan atas dana desa adalah pada program-program kerja desa, terkhususnya pembangunan infrastruktur di desa. Desa mempunyai wilayah yang luas dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh pemerintah desa, namun kemampuan desa dalam mengelola alokasi dana tersebut masih diragukan. Kurangnya sumber daya manusia serta pengawasan yang cukup membuat pengelolaan dana desa tidak berjalan dengan baik dan lancar (Ningsih, 2024:58). Salah satunya Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang yang setiap tahunnya mendapatkan dana desa dari pemerintah. Berikut pada Tabel 1.1 menjelaskan alokasi dana desa di Desa Semandang Kiri.

Tabel 1.1
Penggunaan Alokasi Dana Desa Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran
A	**Penyelengaraan Perintah Desa**	
1	Penghasilan tetap dan tunjangan	Rp. -
2	Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat	Rp.322.743.120
3	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.42.500.000
4	Jaminan ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa	Rp.1.742.832
5	Jaminan ketenagakerjaan BPD	Rp.453.600
6	Jaminan ketenagakerjaan RT	Rp.1.036.800
B	**Oprasional Perkantoran**	
1	Alat Tulis Kantor	Rp.4.882.971
2	Belanja perjalanan Dinas	Rp.20.000.000
3	Penyedian Tunjangan BPD	Rp.58.800.000
4	Belanja Barang Perlengkapan Kantor	Rp.299.840
5	Insentif RT	Rp.28.800.000
C	**Belanja Cetak dan Penggandaan**	
1	Potocopy	Rp.3.000.000
D	**Belanja Konsumsi**	
1	Belanja Konsumsi Haruian Kantor	Rp.4.000.000
2	Insentif Tim PPKD	Rp.13.200.000
3	Honor Bendahara	Rp.3.600.000
4	Belanja pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Rp.2.500.000
5	Belanja Pemeliharaan Laptop dan Printer	Rp.509.600
E	**Penyedian Aset Tepat Perkantoran**	
1	Proyektor	Rp.8.700.000
2	Laptop	Rp.9.000.000
3	Hardisk	Rp.1.000.000
F	**Penyelenggaraan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa**	
1	Penyusunan RKPDes	Rp.3.000.000
2	Penyusunan Dokumen APBDes dan LPJ	Rp.4.500.000
G	**Bidang Pembinaan Kemasyarkatan**	
1	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	Rp.6.200.000
2	Kegiatan Pembinaan PKK	Rp.5.200.000
Total		**Rp.545.668.763**

Sumber: Desa Semandang Kiri, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2025 lebih banyak dialokasikan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk pembayaran penghasilan tetap kepala

desa dan perangkat desa sebesar Rp322.743.120, serta tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp42.500.000. Selain itu, terdapat juga alokasi untuk jaminan ketenagakerjaan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan RT. Pada bagian operasional perkantoran, dana digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti alat tulis kantor, perjalanan dinas, tunjangan BPD, serta insentif RT.

Anggaran juga digunakan untuk belanja cetak dan penggandaan, belanja konsumsi kantor, insentif tim pengelola keuangan desa, honor bendahara, serta pemeliharaan kendaraan dan peralatan kantor. Selain itu, terdapat pula pengadaan aset perkantoran seperti proyektor, laptop, dan hardisk yang bertujuan untuk mendukung kelancaran administrasi pemerintahan desa. Dana ADD juga dialokasikan untuk penyusunan dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan APBDes, serta kegiatan pembinaan kemasyarakatan seperti pembinaan lembaga adat dan kegiatan PKK.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa yang menjelaskan bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa adalah tentang lingkungan pemukiman, salah satunya adalah jalan (meliputi jalan pemukiman, jalan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, jalan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian. Hal ini, menjadi daya tarik dalam penelitian ini, sebab demikian Kabupaten

Ketapang mengalami hal yang sama yang terjadi di setiap kabupaten/kota di daerahnya.

Desa Semandang Kiri yang merupakan salah satu Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang juga telah menerima dana desa setiap tahunnya dari pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi Desa Semandang Kiri ini ditemukan masih banyak jalan permukiman warga yang dalam kondisi kurang baik atau rusak namun jalan tersebut adalah jalan umum yang sering digunakan masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya. Sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa.

Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Efektivitas pengelolaan dana desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparansi kepada masyarakat dalam prosesnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi alokasi dana desa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang judul

"Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kabupaten Ketapang".

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang mengenai Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu 1) Kurangnya kejelasan komunikasi dalam penyampaian informasi terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa antara pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah desa, 2) Keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa dalam pengelolaan administrasi dan keuangan Alokasi Dana Desa, 3) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh Alokasi Dana Desa, 4) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, 5) Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan yang belum optimal dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa, dan 6) Struktur birokrasi dan koordinasi antar perangkat desa yang belum berjalan secara efektif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa.

1.3. Fokus Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus, maka peneliti membatasi penelitian pada implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri yang dianalisis yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Batasan ini ditetapkan karena

masih ditemukan permasalahan seperti kurangnya kejelasan komunikasi dalam penyampaian informasi kebijakan, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa, sikap dan komitmen pelaksana yang belum optimal, serta belum efektifnya struktur birokrasi dan koordinasi antar perangkat desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan fokus penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang".

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut "Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang".

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan terkait implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.
2. Sebagai informasi mengenai pengembangan ilmu administrasi publik dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan dalam masyarakat.

1.6.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, penelitian ini dapat membantu pemerintah desa dalam memperbaiki aspek komunikasi, pengelolaan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Lembaga Desa (BPD)

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD). Dengan adanya penelitian ini, BPD dapat lebih optimal dalam memastikan bahwa penggunaan dana desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta aspirasi masyarakat.

3. Bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam merumuskan kebijakan, melakukan pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). DPMD memiliki fungsi penting dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan desa melalui kegiatan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu, DPMD juga berperan dalam menyusun pedoman teknis, memberikan pelatihan kepada aparatur desa, serta memastikan bahwa pelaksanaan ADD berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran serta dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa serta turut menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.